

Muammar Khadafi di Libya dan Pengaruhnya di Afrika Utara (1969–2011)

Muhammad Nur Irsyad Muchtar¹, Fitra Widya Wati^{2*}, Rusmala Dewi Kabubu³, La Malihu⁴

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Makassar

m.nurirsyadm2004@gmail.com, fitra.widya.wati@unm.ac.id, rusmala.dewi@unm.ac.id,

lamalihu@unm.ac.id

corresponding author*)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi yang dilakukan Muammar Khadafi di Libya serta pengaruhnya di Afrika Utara antara 1969 hingga 2011. Melalui kudeta militer pada 1969, Khadafi mengubah Libya dengan kebijakan nasionalisasi minyak dan penerapan *Green Book* sebagai panduan ideologi yang menolak sistem partai politik. Kebijakan ini membawa Libya pada pendekatan Pan-Arabisme dan Pan-Africanisme, dengan tujuan menjadikan Libya pemimpin regional. Pendekatan ini, walaupun ambisius, juga mengundang kontroversi baik di dalam negeri maupun di kawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan data yang dikumpulkan dari artikel dan jurnal online. Data ini dianalisis untuk memahami bagaimana kebijakan Khadafi memengaruhi tatanan politik, ekonomi, dan sosial di Libya serta dampaknya di Afrika Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Khadafi berdampak signifikan, di satu sisi meningkatkan peran Libya di Afrika Utara, namun di sisi lain menimbulkan ketegangan dengan negara-negara lain. Kebijakan represif dan gaya kepemimpinan otoriternya mengakibatkan konflik yang mengakar. Setelah jatuhnya Khadafi pada 2011, Libya justru mengalami ketidakstabilan, yang memperlihatkan ambivalensi warisan kepemimpinannya. Meski modernisasi ekonomi dicapai, konflik dan perpecahan menjadi warisan yang terus memengaruhi stabilitas kawasan hingga saat ini.

Kata Kunci: Libya, Muammar Khadafi, Indonesia, Gerakan Non-Blok, hubungan diplomatik.

Abstract

This research aims to analyze the transformation carried out by Muammar Khadafi in Libya and its influence in North Africa between 1969 and 2011. Through a military coup in 1969, Khadafi changed Libya with a policy of oil nationalization and the implementation of the Green Book as an ideological guide that rejected the political party system. This policy brought Libya to an approach of Pan-Arabism and Pan-Africanism, with the aim of making Libya a regional leader. This approach, although ambitious, has also attracted controversy both domestically and in the region. The research method used is qualitative, with data collected from articles and online journals. This data is analyzed to understand how Khadafi's policies influenced the political, economic and social order in Libya and their impact on North Africa. The research results show that Khadafi's leadership had a significant impact, on the one hand increasing Libya's role in North Africa, but on the other hand creating tensions with other countries. His repressive policies and authoritarian leadership style resulted in deep-rooted conflict. After the fall of Khadafi in 2011, Libya experienced instability, which showed the ambivalence of his leadership legacy. Even though economic modernization was achieved, conflict and division became a legacy that continues to influence regional stability to this day.

Keywords: Libya, Muammar Khadafi, Indonesia, Non-Aligned Movement, diplomatic relations.

PENDAHULUAN

Salah satu presiden terkenal yang berasal dari Libya penuh dengan "kontroversi", setidaknya menurut media-media Barat. Nama lengkapnya adalah Muammar Abu Minyar al-Khadafi, dan dia lahir pada 7 Juni 1942 di Qasr Abu Hadi di Sirte. Ia berasal dari keluarga kecil Arab dengan akar Berber, Suku Qadhadfa. Ayah Khadafi, Mohammad Abdul Salam bin Hamed bin Mohammad, juga dikenal sebagai Abu Meniar, hanyalah seorang penggembala. Pada usia 9 tahun, ibunya, Aisha, adalah seorang Yahudi mualaf. Kehidupan mereka bergerak. (Tamburaka, 2012).

Walaupun keluarga Khadafi sangat miskin, orang tuanya tetap memperhatikan pendidikan anaknya. Ayah Khadafi, Abu Meniar, memutuskan untuk memanggil seorang guru untuk mengajarkan Al-Qur'an ketika dia berusia 7 tahun. Sama seperti itu, Muammar Khadafi belajar di sekolah dasar sebelum pergi ke Sekolah Menengah Pertama Misrata, yang memprioritaskan pelajaran sejarah. Dari tahun 1956 hingga 1961, ia menjadi siswa Sekolah Menengah Atas di kota Sebha. Di sekolah menengah atas ini, Khadafi dan teman-temannya membentuk kelompok militan yang akan melakukan kudeta di Libya. (Bahaudin, 2012). Di Misrata, Khadafi menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan negara dari ketidakadilan Raja Idris adalah melalui revolusi dan menata kembali masyarakat dengan prinsip keadilan, persamaan, dan pembagian kekayaan yang merata. Kelompok militan bersenjata ini berkumpul untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu PBB. (Ayoub, 1991).

Dunia menyaksikan revolusi yang terjadi pada 1 September 1969 yang mengubah sejarah politik Libya dan Afrika Utara. Setelah Libya memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1951, revolusi militer yang dipimpin oleh seorang perwira muda bernama Muammar Khadafi menggulingkan monarki. Raja Idris I, yang kala itu berada di luar negeri untuk perawatan kesehatan, digantikan secara tiba-tiba oleh kelompok perwira militer muda yang menamakan diri sebagai Gerakan Perwira Bebas. Revolusi ini berlangsung tanpa pertumpahan darah, tetapi dampaknya jauh melampaui batasan Libya sendiri, memengaruhi dinamika politik regional dan global selama beberapa dekade berikutnya. Dengan segera, Khadafi menerapkan kebijakan-kebijakan radikal yang bertujuan untuk merombak struktur sosial, ekonomi, dan politik negara.

Hingga 2011, politisi revolusioner ini memegang kekuasaan di Libya selama lebih dari empat puluh tahun. Tulisannya diberi judul "Buku Hijau", yang diterbitkan pada tahun 1975, dan merujuk kepada buku Mao. Semua orang di Libya harus membaca "Buku Hijau", yang menjelaskan filosofi politik Gaddafi. Selain "Buku Hijau", Khadafi juga menulis buku esai berjudul *Escape to Hell*, yang diterbitkan dalam versi bahasa Inggris pada tahun 1998 (Wahyono 2019). Dengan mendukung apa yang disebut Khadafi sebagai demokrasi langsung, buku hijau ini menawarkan konsep alternatif untuk sosialisme dan kapitalisme. Kebijakan nasionalisasi minyak yang diterapkan Libya pada awal 1970-an menjadikannya pemimpin Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Pendapatan minyak digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan besar di dalam negeri serta untuk mendukung gerakan-gerakan pembebasan di seluruh Afrika dan Timur Tengah. Tidak hanya berfokus pada Libya, Khadafi berusaha menyatukan wilayah Afrika Utara dan dunia Arab melalui upaya Pan-Arabisme dan Pan-Africanisme. Ia memosisikan dirinya sebagai pemimpin revolusi di Afrika dan Timur Tengah, mendukung

perjuangan anti-kolonial di berbagai negara seperti Chad, Sudan, dan beberapa bagian Afrika Sub-Sahara. Melalui pendekatan ini, Khadafi membentuk aliansi strategis dengan berbagai kelompok pemberontak dan pemerintahan, yang semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di kawasan tersebut.

Hingga 2011, Kepemimpinan Khadafi, bagaimanapun, tidak terlepas dari kontroversi. Di satu sisi, ia mendapat pujian karena upayanya untuk mengakhiri kemiskinan di Libya dan meningkatkan standar hidup masyarakat melalui proyek pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, Khadafi sering dikritik sebagai seorang diktator yang memerintah dengan tangan besi, menindas orang yang menentangnya, dan menggunakan sistem represif untuk mengontrol negara. Ketidakpuasan internal dan eksternal terhadap pemerintahannya meningkat ketika Arab Spring mengguncang Afrika Utara dan Timur Tengah pada tahun 2011, yang akhirnya menyebabkan rezim Khadafi runtuh setelah 42 tahun berkuasa.

Meskipun berawal sebagai upaya untuk meningkatkan otoritas dan memperkuat kemandirian Libya, Revolusi Al-Fateh membawa dampak besar pada Afrika Utara dan bahkan di seluruh dunia. revolusioner ini memegang kekuasaan di Libya selama lebih dari empat puluh tahun. Tulisannya diberi judul "Buku Hijau", yang diterbitkan pada tahun 1975, dan merujuk kepada buku Mao. Semua orang di Libya harus membaca "Buku Hijau", yang menjelaskan filosofi politik Gaddafi. Selain "Buku Hijau", Khadafi juga menulis buku esai berjudul *Escape to Hell*, yang diterbitkan dalam versi bahasa Inggris pada tahun 1998 (Wahyono 2019). Dengan mendukung apa yang disebut Khadafi sebagai demokrasi langsung, buku hijau ini menawarkan konsep alternatif untuk sosialisme dan kapitalisme. Kebijakan nasionalisasi minyak yang diterapkan Libya pada awal 1970-an menjadikannya pemimpin Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber-sumber atau data yang dikumpulkan berasal dari artikel dan jurnal *online* yang terdapat di internet. Data yang telah terkumpul tersebut bisa disusun dan menjadi sumber informasi dalam penulisan artikel ini. Data-data atau informasi-informasi yang diperlukan akan dicari di internet yang kemudian akan diinterpretasi dan dikaji di dalam artikel ini. Seperti yang disebutkan tadi, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil beberapa sumber dari artikel ilmiah beserta jurnal *online*. Data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber diverifikasi demi memastikan data tersebut bersifat faktual guna menghindari adanya kesalahan informasi yang diberikan dari artikel tersebut.

PEMBAHASAN

A. Muammar Khadafi sebelum Memimpin Libya

Nama lengkap Muammar Abu Minyar al-Khadafi, Muammar Khadafi lahir pada 7 Juni 1942 di Qasr Abu Hadi di Sirte. Ia berasal dari Qadhadfa, sebuah suku Arab kecil. Putra dari keluarga Badui yang miskin yang berpindah-pindah di gurun pasir Sirte, Libya, adalah Khadafi. Ayahnya, Mohammad Abdul Salam bin Hamed bin Mohammad, juga dikenal sebagai Abu Meniar, adalah penggembala kambing dan unta. Selain itu, ibunya, Aisha, awalnya Yahudi dan memeluk Islam pada usia sembilan tahun (Apriadi, 2012).

Pendidikan dari Khadafi bermula ketika seorang guru yang mengajarkan membaca Al-Qur'an di desanya. Selain itu, ia menerima pendidikan formal di sekolah dasar tradisional, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di bawah bimbingan seorang guru swasta di Misrata yang berfokus pada pelajaran sejarah. Dari tahun 1956 hingga 1961, Khadafi belajar di Sekolah Menengah Atas di kota Sebha. Selama sekolah menengah atas, ia dan teman dekatnya membentuk kepemimpinan utama kelompok revolusioner militan yang akan mengambil alih kekuasaan di Libya. Setelah Sekolah Menengah Atas, Khadafi mendaftar di Universitas Libya, tetapi pada tahun 1961 dia memilih untuk bergabung dengan Akademi Militer Libya di Benghazi. Antara tahun 1965 dan 1966, Khadafi lulus bersama teman-temannya di Dewan Komando Revolusioner karena dia percaya militer adalah satu-satunya cara untuk membawa perubahan di Libya. Setelah itu, ia terpilih untuk menjalani pelatihan militer di Akademi Militer Royal Sandhurst di Inggris dan Akademi Militer Hellenic di Athena, Yunani (Humaidi, 2019).

Perang Arab-Israel pada tahun 1948, Revolusi Mesir pada tahun 1952, krisis Terusan Suez pada tahun 1956, dan pembentukan Serikat Republik Arab antara tahun 1958 dan 1961 adalah beberapa peristiwa yang melanda wilayah Timur Tengah saat Muammar Khadafi tumbuh. Situasi yang tidak stabil yang dihasilkan dari berbagai konflik di Timur Tengah ini memengaruhi pemikiran Khadafi, yang mulai tertarik pada militer. Karena pendapatnya yang kontroversial dan anti-imperialisme Barat, ia mengidolakan Gamal Abdul Nasser, seorang politisi Mesir. Pada malam 31 Agustus 1969, Muammar Khadafi dan 69 rekannya melakukan kudeta, yang berhasil pada 1 September 1969. Sebelumnya, dia ingin melakukan kudeta pada 12 Maret 1969, tetapi itu dibatalkan karena bersamaan dengan konser amal untuk Palestina yang dilakukan oleh penyanyi Mesir terkenal Um Khaltum.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Raja Idris telah berlangsung sejak tahun 1967, dan puncaknya adalah kudeta yang dilakukan oleh Khadafi dan kelompoknya yang tergabung dalam *Mouvement Free Officer*. Kekalahan Mesir dalam Perang Enam Hari melawan Israel juga berkontribusi pada gejolak politik saat itu; Raja Idris cenderung memihak Israel, yang menyebabkan kerusuhan di Tripoli dan Benghazi. Selain itu, Raja Idris terlibat dalam korupsi terkait industri perminyakan Libya yang dimulai sejak penemuan minyak pertama pada tahun 1959. Agar tidak adanya korban jiwa, kudeta dilakukan dengan cara yang tertutup dan terorganisir secara rapi, tanpa menggunakan banyak pasukan. Rencana Khadafi adalah mengambil alih stasiun radio dan barak militer pada pukul 01.00 dini hari. Putra mahkota

ditangkap di istananya oleh kelompok yang dipimpin oleh Khweldi Hameidi, yang kemudian ditahan oleh rezim Khadafi.

B. Libya Sebelum Pemerintahan Khadafi

Sebelum Muammar Khadafi berkuasa, Libya berbentuk federasi dengan sistem monarki. Raja Idris, yang menjadi pemimpin saat itu, enggan menyerahkan kekuasaan di luar garis keturunannya, sehingga ia mulai mempersiapkan ahli warisnya sebagai penerus. Kebijakan luar negerinya condong ke Barat, termasuk perjanjian dengan Inggris pada 1953 dan Amerika Serikat pada 1970, yang mengizinkan kedua negara membangun pangkalan militer di Libya. Dukungan Barat meningkatkan ekonomi Libya melalui bantuan untuk pertanian, pendidikan, dan militer, tetapi juga menciptakan ketergantungan yang membuat Libya rentan secara ekonomi. (Lapidus, 2000)

Sejak awal abad ke-20 hingga Perang Dunia Kedua, Italia menjajah Libya. Setelah perang, itu dibagi antara Inggris dan Prancis. Untuk memerintah Libya, Inggris memilih raja Idris I dari Dinasti Senussi, yang dipimpin oleh Arab Saudi dan didukung oleh PBB. Libya tetap menjadi target politik dan ekonomi Inggris di bawah kepemimpinan Raja Idris I, yang berkuasa sejak kemerdekaan negara tersebut pada tahun 1951. Libya memiliki sumber minyak yang ditemukan pada tahun 1959, tetapi kekayaan itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Libya adalah negara federasi dengan monarki berdasarkan Konstitusi Oktober 1951 (Rizal, 2008). Raja adalah pemimpin negara, dan dia memiliki otoritas penuh untuk membuat kebijakan pemerintah, termasuk memilih kepala badan legislatif dan eksekutif.

Menurut Konstitusi Oktober 1951, Libya adalah negara federasi dengan sistem monarki (Rizal, 2008). Pemimpin negara adalah seorang raja yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan kebijakan pemerintah, termasuk menunjuk kepala badan legislatif dan eksekutif. Namun, kekuasaan Raja Idris berakhir ketika ia dikudeta oleh perwira muda Muammar Khadafi pada 1 September 1969. Raja Idris sedang berada di Turki untuk kepentingan medis putranya, Hasan as-Senusi, saat kudeta terjadi. Raja Idris menandatangani dokumen pengunduran diri sebelum berangkat, tetapi para perwira menyembunyikannya, jadi Hasan tidak bisa menjadi penerusnya (Tambaruka, 2011).

Kebijakan luar negeri Raja Idris umumnya pro-Barat, seperti yang ditunjukkan oleh perjanjian persahabatan yang dia buat dengan sejumlah negara. Libya menandatangani perjanjian dengan Inggris pada tahun 1953 dan dengan Amerika pada tahun 1970. Perjanjian tersebut memberikan izin kepada kedua negara untuk membangun pangkalan militer dan tempat pelatihan perang. Ekonomi Libya mendapat manfaat dari sikap bersahabat dengan Barat karena negara-negara Barat menawarkan bantuan untuk mempercepat kemajuan di bidang pertanian, pendidikan, dan pertahanan.

Setelah penemuan ladang minyak di Zalan di Cyrenaica, tahun 1959 menjadi titik balik bagi kemakmuran Libya. Setelah penemuan ini, lokasi minyak lainnya ditemukan, mempercepat pertumbuhan perdagangan Libya. Libya semakin menguntungkan karena lokasinya yang strategis dan dekat dengan pasar Eropa. Setelah penemuan minyak, ekonomi, khususnya perdagangan, berkembang dengan cepat. Libya telah berkembang dari negara miskin menjadi negara maju berkat minyak. Meskipun sikap politik Libya yang lunak terhadap

Barat menyebabkan ketergantungan pada bantuan asing, kondisi ekonomi Libya tetap tertekan oleh aliran bantuan tersebut. Oleh karena itu, Libya masih menjadi negara yang miskin dan tergantung pada negara lain. Saat itu, semangat nasionalisme bangsa Arab sedang meningkat, yang menjadi ancaman politik bagi Libya. Generasi muda Libya mulai terpengaruh oleh ideologi yang dipromosikan oleh Gamal. Menyadari besarnya gelombang anti-Barat yang sedang melanda, pemerintah Libya segera mengambil tindakan dengan meminta pengunduran pangkalan-pangkalan Barat dari wilayahnya.

Sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial Libya mengalami kemunduran selama monarki. Dari empat juta orang yang melek huruf, hanya sekitar dua puluh lima ribu mampu membaca dan menulis. Namun, Kolonel Muammar Khadafi berhasil membebaskan Libya dari intervensi dan pengaruh luar pada tahun 1969, menggulingkan Dinasti Senussi. Mendistribusikan kekayaan alam Libya untuk kesejahteraan umum adalah salah satu kebijakan utama Khadafi (Thierry, 2020).

C. Libya dengan Pemerintahan Khadafi

Pada tahun 1969, pemerintahan monarki Raja Idris runtuh, dan Muammar Khadafi menjadi presiden Libya. Di awal pemerintahannya, Khadafi menerapkan undang-undang yang anti-Barat dan memprioritaskan militer daripada ekonomi. Selain itu, ia menggunakan militer untuk menghapus musuh politiknya (Irenewati, 2014). Tumbuh dalam lingkungan yang sangat politis dan agama, dengan keluarga yang taat beragama dan nilai perjuangan melawan kolonialisme Eropa yang dipegang oleh Khadafi. Meskipun demikian, Khadafi tidak bermaksud untuk membentuk negara Islam. Tujuan utamanya adalah menjamin bahwa pemikiran dan tindakannya akan menguntungkan semua orang Libya dan Arab (Tambaruka, 2011).

Sektor minyak bumi Libya menyumbang 52,8% dari pendapatan negara, menjadikannya salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia selama pemerintahan Khadafi. Sekitar 95% produksi minyak dan gas alam Libya diekspor, menyumbang lebih dari setengah produk domestik bruto (PDB) negara, dan minyak jenis ringan manis dengan kandungan sulfur rendah sangat cocok untuk pengolahan menjadi solar dan bensin. Sebaliknya, kebijakan politik dan ekonomi yang otoriter pemerintahan Khadafi menyebabkan peluang kerja yang semakin terbatas, yang menyebabkan peningkatan pengangguran. Akibatnya, pemerintahan Khadafi dikritik dan memicu konflik di dalam negeri. (Tambaruka, 2011).

Libya sangat berpengaruh di dunia berkat cadangan minyak mentahnya yang melimpah. Libya mengeksport sekitar 1,38 miliar dolar AS per tahun dan memiliki cadangan minyak sebanyak 46,42 miliar barel. Libya adalah negara penghasil minyak terbesar ke-12 di dunia, menyumbang 2,1 persen dari produksi minyak global. Krisis politik di Libya sempat mengurangi produksi minyak hingga setengahnya, yang menyebabkan harga minyak dunia melonjak melebihi 100 dolar AS per barel. Posisi geografis Libya yang dekat dengan Eropa juga memberikan keuntungan besar, mempermudah akses langsung ke pasar Eropa (Rizal, 2008).

Di bawah kepemimpinan Muammar Libya didirikan sebagai negara Arab dengan Islam sebagai agama resminya selama pemerintahan Muammar Khadafi. Negara itu menjadi lebih

radikal dengan semua kebijakannya berpusat pada Khadafi. Pada tahun 1973, ia menciptakan "teori universal" yang menggabungkan demokrasi rakyat dan nasionalisme Arab. Ideologi ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pengganti komunisme ateis dan kapitalisme materialis. Itu didasarkan pada iman kepada Allah. Khadafi, Libya diakui sebagai negara Arab dengan Islam sebagai agama resminya. Negara ini menerapkan nilai-nilai Islam dalam perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Kebijakan Libya yang berpusat pada Khadafi menjadi lebih radikal. Pada tahun 1973, ia menciptakan "teori universal" yang menggabungkan demokrasi rakyat dan nasionalisme Arab. Menurut Munginggar (2003), ideologi ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai alternatif untuk kapitalisme materialis dan komunisme ateis. Itu juga didasarkan pada iman kepada Allah. Pada tahun 1970, Khadafi menentang zionisme Israel dan mengusir orang Italia dan komunitas Yahudi dari Libya. Memerintahkan intelijennya untuk menghasut dan membunuh warga Libya yang berada di pengasingan menunjukkan kediktatorannya. Selain itu, Khadafi menyebabkan banyak penindasan dan korupsi dengan menunjuk teman dan keluarganya ke posisi penting dalam pemerintahan. (Munginggar, 2003).

Pada tahun 1970, Khadafi menentang zionisme Israel dan mengusir orang Italia dan komunitas Yahudi dari Libya. Memerintahkan intelijennya untuk menghasut dan membunuh warga Libya yang berada di pengasingan menunjukkan kediktatorannya. Selain itu, Khadafi menyebabkan banyak penindasan dan korupsi dengan menunjuk teman dan keluarganya ke posisi penting dalam pemerintahan. Oleh karena itu, rakyat Libya hidup dalam kemiskinan sementara Khadafi dan pengikutnya mengumpulkan kekayaan dan menghapus pembangkang. Selain itu, Khadafi meminta persatuan Arab. Pada 12 Juni 1971, dia mendirikan Arab Socialist Union (ASU). Untuk proses reformasi yang efektif selama masa transisi, negara harus kuat, kata Khadafi. Tujuan pembentukan partai tunggal ini adalah untuk mendorong sebagian besar orang untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu, seperti sistem partai tunggal lainnya, sistem ini memaksa orang untuk mengikuti pendapat pemimpin partai.

Pada masa rezim Khadafi, sistem pemaksaan persepsi politik menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Libya yang majemuk. Sebagai tanggapan, pada tahun 1972, Khadafi mengeluarkan Undang-Undang No. 71, yang secara resmi melarang partai politik di Libya. Ia beralasan bahwa partai politik gagal menyatukan berbagai golongan di negara tersebut. UU ini juga melarang segala bentuk penyampaian aspirasi atau protes terhadap pemerintah. Pemerintah Libya di bawah Khadafi menggunakan undang-undang ini sebagai dasar untuk menindak individu dan kelompok yang melakukan aksi protes atau menentang kebijakan pemerintah.

Dikenal dengan gaya *nyentriknya*, Khadafi sering pergi ke luar negeri dengan tenda dan berpakaian aneh. Selain itu, pemerintahnya membantu kelompok anti-Barat, yang membuat Libya dianggap sebagai musuh banyak negara. Selama lebih dari sepuluh tahun, Inggris bahkan menghentikan hubungan diplomatik dengan Libya. Libya dituduh terlibat dalam beberapa tindakan terorisme, seperti peledakan klub di Berlin Barat 1986, pemboman pesawat di Lockerbie, Skotlandia di tahun 1988, dan peledakan pesawat penumpang Perancis pada tahun 1989. Pada 1990-an, hubungan Khadafi dengan negara-negara Barat mulai membaik karena ancaman dari kelompok Islam yang menentang kekuasaannya. Khadafi mulai bekerja sama dengan intelijen Inggris dan Amerika. Hubungan ini, termasuk dengan Perdana Menteri Italia

Silvio Berlusconi, dikritik banyak pihak karena dianggap didasarkan pada kepentingan bisnis dan akses minyak.

Sekitar 86 mahasiswa dan aktivis profesional ditangkap dan dipenjarakan pada tahun 2002 karena terlibat dalam organisasi politik Islam di Libya. Selama pemerintahan Khadafi, Libya sering melanggar hak asasi manusia, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa, eksekusi tanpa proses hukum, dan kematian tahanan karena penyiksaan, menurut Amnesty International (Amnesty International, 2010). Organisasi massa dan kelompok kepentingan dianggap melanggar Undang-Undang Libya tahun 1972, sehingga pemerintah Libya dapat melakukan penangkapan dan kekerasan terhadap mereka. (Calgary, 2011).

D. Jatuhnya Libya Bersama Khadafi beserta Dampaknya

Pada tahun 2011, ada revolusi untuk menjatuhkan Muammar Khadafi di Libya, yang merupakan bagian dari gelombang protes rakyat yang lebih besar yang dikenal sebagai Arab Spring. Gerakan ini menandai akhir dari pemerintahan diktator Khadafi selama empat puluh dua tahun, dan juga merupakan simbol perjuangan rakyat Libya melawan korupsi, represi, dan ketidakadilan yang telah ada selama bertahun-tahun. Ketika pemerintah tidak memenuhi harapan rakyat di negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah, seringkali muncul gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan melalui Revolusi. Fenomena ini terjadi saat Afrika Utara dan Timur Tengah dilanda oleh gelombang revolusi yang disebut "Revolusi Melati"—sebuah istilah yang menggambarkan pergeseran politik di wilayah tersebut seperti bunga melati yang bermekaran. (Tamburaka, 2012).

Teori Domino menggambarkan hubungan ideologi-ideologi dan bagaimana hal itu berdampak pada agama, budaya, politik, ekonomi, dan relasi antarnegara, menggambarkan revolusi di Timur Tengah seperti deretan kartu domino yang runtuh secara berurutan saat satu kartu jatuh. Tunisia adalah negara asal Revolusi Melati, yang kemudian berkembang ke Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya, dan Suriah. Selain Tunisia, revolusi telah menginspirasi negara lain untuk menggulingkan pemimpin tirani. Rakyat Libya dimotivasi untuk mengikuti jejak Tunisia. (Irenewati, 2014).

Perlawanan rakyat Libya sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Kelompok oposisi seperti Konferensi Nasional Oposisi Libya, Front Nasional untuk Keselamatan Libya, dan Komite Aksi Nasional Libya di Eropa bertanggung jawab atas serangan yang hampir membunuh Muammar Khadafi pada Oktober 1933. Pada tahun 2006, demonstrasi mungkin terjadi sebagai tanggapan atas penahanan seorang aktivis mahasiswa HAM dan demokrasi di Libya, yang memicu pemberontakan terhadap Khadafi. Namun, keadaan kembali stabil setelah peristiwa tersebut. Di Libya, pemerintahan diktator Khadafi dianggap normal.

Revolusi Libya pada 2011 bermula dari demonstrasi anti-pemerintah yang dipicu oleh penangkapan pengacara yang mewakili keluarga korban pembantaian di penjara pada 1996. Peristiwa ini diikuti oleh penangkapan aktivis HAM, Fathil Terbil, yang memicu kemarahan masyarakat. Penangkapan Terbil oleh aparat keamanan memotivasi rakyat Libya untuk melakukan aksi demonstrasi di berbagai kota. Dalam waktu singkat, gelombang protes ini

semakin meluas dan merambah hampir seluruh wilayah di Libya, menciptakan gerakan yang pada akhirnya berkembang menjadi revolusi besar. (Ahmad, 2017).

Selain itu, kebijakan Muammar Khadafi yang bertujuan untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin tertinggi juga berkontribusi pada revolusi tahun 2011. Dengan kebijakannya yang otoriter, mereka melanggar hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Mereka juga dilarang bergabung dengan partai politik dan kelompok lain. Dalam konflik ini, ada dua kelompok utama: yang mendukung Khadafi (termasuk anggota keluarga, kerabat, dan menteri kabinet) dan yang menentangnya. Selain itu, ada koalisi internasional (Inggris, Prancis, dan AS) yang menginginkan hukuman Khadafi.

Selain itu, adanya faktor-faktor lain yang memicu munculnya revolusi ini diantaranya:

1. Dampak Arab Spring dan Dendam Masa Lalu: Revolusi Arab Spring menginspirasi pendukung Raja Idris untuk membalas dendam terhadap Khadafi yang merebut kekuasaan melalui kudeta pada 1969.
2. Keinginan Menjadi Negara Demokrasi: Rakyat Libya merindukan kebebasan berpendapat dan keadilan, yang selama ini ditindas di bawah rezim Khadafi, terutama setelah insiden penahanan dan pembunuhan aktivis serta oposisi.
3. Ekonomi yang Memburuk: Meskipun kaya minyak, kekayaan negara hanya dinikmati oleh Khadafi dan keluarganya, sementara rakyat tetap miskin dan berjuang.
4. Intervensi Asing: Negara asing memanfaatkan situasi untuk menguasai sumber daya minyak Libya, disertai narasi keagamaan yang mendorong perlawanan terhadap Khadafi.

Munculnya revolusi ini didukung juga dengan kebijakan Khadafi menyebabkan penderitaan rakyat, dengan berbagai aspirasi yang dibungkam, dan ia tak segan-segan menindas bahkan membunuh pihak yang menentangnya. Rakyat Libya mendambakan kebebasan dan demokrasi yang seharusnya berjalan tanpa ancaman dari pemerintah. Selama 42 tahun pemerintahan Khadafi, Libya tidak memiliki partai politik maupun institusi formal, serta tidak ada kelas menengah. Masyarakatnya terbagi antara kelas miskin dan elite penguasa, dengan persaingan antarsuku yang dipengaruhi oleh uang. Khadafi mengendalikan suku-suku utama—Al-Qaddadfa, Al-Magariha, dan Al-Warfalla—yang menjadi tulang punggung kekuasaannya untuk mencegah konflik antar-suku (Muninggar, 2013). Setelah menyaksikan revolusi di negara tetangganya, rakyat Libya mulai sadar diri. Kemungkinan besar, Khadafi menyadari kemungkinan terjadinya revolusi di wilayah Timur Tengah yang mungkin memasuki Libya. Untuk mencegah hal ini terjadi, ia menghentikan akses ke media sosial untuk mencegah warga Libya terpapar informasi yang dapat memicu revolusi dari sumber luar. Langkah pembatasan ini menyebabkan reaksi dari masyarakat. Sekitar 200 orang memulai demonstrasi di depan markas polisi Benghazi pada 15 Februari 2011.

Ratusan orang melakukan demonstrasi di Zintan dan Al Bayda selain di Benghazi, membakar kantor polisi dan fasilitas keamanan. Gelombang demonstrasi kemudian berkembang hingga mencakup hampir seluruh kota Libya seperti Zawiyah, Zintan, Ajdabiyah, Al Bayda, dan Misrata (bbc.co.uk). Pemerintah Khadafi menanggapi protes yang dilakukan oleh pemberontak Libya dengan keras karena dianggap mengancam keamanan negara. Di bawah komando Khadafi, pasukan militer Libya, termasuk jet tempur, dikirim untuk

menyerang wilayah yang dikuasai oleh pemberontak atau demonstran. Dalam menangani gerakan massa ini, tindakan represif Khadafi memicu perlawanan yang kuat dari sebagian besar rakyat Libya, yang mengakibatkan eskalasi konflik. Pemerintahan Khadafi yang represif dikecam oleh negara-negara asing, termasuk Amerika Serikat, yang menilai terjadi pelanggaran HAM di Libya. Sebagai anggota PBB, Amerika mendukung intervensi untuk melindungi rakyat Libya dari kekerasan. Situasi Libya yang tidak stabil mendorong oposisi mengadakan pertemuan di Bayda dan membentuk Dewan Transisi Nasional (NTC) pada 27 Februari 2011 di Benghazi, untuk mengoordinasi pemberontakan.

NTC mendeklarasikan diri sebagai pemerintahan sah pada 5 Maret 2011, menggalang dukungan internasional. Dewan Keamanan PBB kemudian mengesahkan Resolusi 1973 yang menerapkan zona larangan terbang di Libya untuk melindungi warga sipil dari serangan Khadafi. Resolusi ini juga membuka jalan bagi NATO untuk intervensi guna melindungi warga dan melemahkan kekuatan Khadafi, yang mempengaruhi kepentingan ekonomi dan geopolitik di kawasan. Intervensi NATO dipandang sejalan dengan prinsip "*responsibility to protect*", yakni perlindungan internasional ketika suatu negara gagal melindungi rakyatnya. Bersama NTC, NATO melancarkan serangan terhadap basis Khadafi hingga ia terbunuh di Sirte (Punky, 2013).

Libya tidak menjadi lebih baik setelah pembunuhan Khadafi; sebaliknya, itu malah menjadi lebih buruk. Akibatnya, negara itu mengalami kerusakan sektor perminyakan, kerusakan infrastruktur, dan trauma sosial akibat kematian ribuan orang. Selain itu, transisi menuju pemerintahan demokratis menjadi sulit karena kekhawatiran tentang intervensi asing dan konflik yang terus berlanjut.

E. Dampak Pemerintahan Khadafi di Negara Lain beserta Pemikiran Politiknya

Teori Domino menggambarkan hubungan ideologi-ideologi dan bagaimana hal itu berdampak pada agama, budaya, politik, ekonomi, dan relasi antarnegara, menggambarkan revolusi di Timur Tengah seperti deretan kartu domino yang runtuh secara berurutan saat satu kartu jatuh. Tunisia adalah negara asal Revolusi Melati, yang kemudian berkembang ke Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya, dan Suriah. Selain Tunisia, revolusi telah menginspirasi negara lain untuk menggulingkan pemimpin tirani. Rakyat Libya dimotivasi untuk mengikuti jejak Tunisia (Hardiadi, 2021).

Setelah pemberontakan di Libya pada tahun 2011, konflik yang telah berlangsung sejak tahun 1960-an di Mali utara semakin memburuk. Kelompok Al-Qaeda di Maghreb Islam (AQIM) dan sekutunya mengambil alih pemerintahan sehari-hari di wilayah utara Mali pada tahun 2012. Ini terutama terjadi di kota-kota seperti Gao, Kidal, dan Timbuktu. Setelah intervensi militer Prancis di Mali untuk memerangi kelompok-kelompok radikal ini, kelemahan pemerintahan Libya memungkinkan kelompok-kelompok ini untuk berpusat di Libya. AQIM dan cabangnya, Al-Mourabitoun, lebih mudah mendapatkan senjata dan beroperasi di sana.

Setelah jatuhnya Khadafi, ISIS Libya mendirikan kamp pelatihan di dekat Sabratha, yang menjadi pusat bagi berbagai rencana serangan teroris. Cameron Colquhoun, mantan analis kontraterorisme dari Inggris, mengatakan kepada *The New York Times* bahwa ancaman besar

terhadap Eropa dimulai saat kelompok Katibat al-Battar, faksi ISIS, kembali ke Libya dan memiliki ruang operasi yang luas. Beberapa serangan besar di Eropa memiliki koneksi dengan kamp ini. Karena filosofi politik revolusioner Muammar Khadafi, Libya terus terlibat dalam konflik dan masalah politik di negara lain. Pada awalnya, Khadafi mendapat dukungan dari rakyat dan negara tetangga karena gagasan Pan Arabisme dan Unifikasi Afrika, terutama selama dua puluh tahun pertama pemerintahannya yang sangat anti-liberal di Barat. Ia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politiknya, dan dia terlibat dalam berbagai konflik internasional, termasuk di Chad, Niger, dan Mesir.

Libya masih terlibat dalam konflik dan masalah politik di negara lain karena filosofi politik revolusioner Muammar Khadafi. Pada awalnya, rakyat dan negara tetangga mendukung Khadafi karena gagasan Pan Arabisme dan Unifikasi Afrika, terutama selama dua dekade awal pemerintahannya yang sangat anti-liberal di Barat. Dia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politiknya, dan dia terlibat dalam banyak konflik internasional, termasuk di Chad, Niger, dan Mesir.

Meskipun ini seringkali bertentangan dengan perjanjian internasional, yang menyebabkan konflik, pendapatan dari sektor minyak yang besar juga digunakan untuk mendanai kebijakan luar negeri yang agresif. Kekayaan politik Khadafi diperoleh melalui pengelolaan minyak negara, penguatan sektor militer, dan dukungan kepada negara lain untuk mencapai tujuan politiknya. Selain itu, ia membagikan hasil minyak kepada keluarga dan setia. Dengan proklamasi konstitusional Dewan Komando Revolusi pada 11 Desember 1969, Khadafi mengedepankan ideologi Arab dan Islam dalam upaya mewujudkan kebangkitan politik identitas Libya. Proklamasi tersebut menyerukan kebebasan, sosialisme, persatuan, dan ikatan Arab dengan Islam sebagai agama negara. Khaddam, yang sangat mendukung nasionalisme Arab, ingin membuat Arab kurang bergantung pada bantuan Barat. Khadafi melakukan konsolidasi kekuasaan dengan sistem terintegrasi dalam aspek ideologi, pemerintahan, dan aparat negara. Dalam "Buku Hijau" (*The Green Book*), ia merumuskan ideologi politik yang seharusnya mendukung pemerintahannya. Namun, pada kenyataannya, Buku Hijau menjadi retorika kosong karena keputusan tetap di tangan Khadafi. Ideologi yang diterapkan secara paksa membatasi kebebasan dan aspirasi rakyat.

Ideologi Khadafi didukung oleh budaya politik yang berbasis suku dan patriarki, meskipun tidak berdasarkan prinsip yang baik. Untuk mencapai tujuan politiknya, Khadafi membutuhkan dukungan militer yang kuat untuk mencegah perlawanan terhadap pemerintahannya. Jika ada orang yang menentang pemerintahannya, mereka akan ditindak dengan represif, termasuk penahanan dan pembunuhan. Intimidasi terhadap rakyat menyebabkan mereka ketakutan akan akibat yang mungkin mereka hadapi. Tekanan internasional berasal dari ketidakpercayaan Khadafi terhadap standar internasional, termasuk yang berkaitan dengan kenegaraan dan kedaulatan. Banyak sanksi dan embargo politik dan ekonomi yang dihadapinya menambah tantangan bagi pemerintahannya.

F. Hubungan Indonesia dengan Libya masa Khadafi

Hubungan antara Indonesia dan Libya sudah ada dari tahun 1991 melalui keanggotaan bersama di Organisasi Kerja Sama Islam dengan Gerakan Non-Blok (GNB). Kedua negara saling menempatkan duta besarnya, dengan Indonesia memiliki kedutaan di Tripoli, dan Libya di Jakarta. Salah satu bentuk kerja sama penting antara kedua negara adalah menjadi fasilitator dalam menyelesaikan konflik di Filipina Selatan antara Pejuang Moro dan Pemerintah Filipina (Ananda, 2022).

Hubungan antara Libya dan Indonesia semakin erat ketika Megawati Soekarnoputri mengambil alih pemerintahan Indonesia pada tahun 2003. Ini disebabkan oleh kunjungan kenegaraan Megawati ke Tripoli. Pada Februari 2004, Presiden Libya, Muammar Khadafi, mengunjungi Jakarta sebagai balasan atas lawatan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Libya pada September 2003. Presiden Libya, Kolonel Muammar Khadafi, juga dijadwalkan untuk mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini tidak terkait dengan rencana Libya untuk memberikan bantuan seratus unit panser amfibi atau pelatihan anggota Gerakan Aceh Merdeka.

Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri Indonesia, mengatakan kedatangan Khadafi termasuk percakapan tentang cara menyelesaikan masalah Aceh. Sebaliknya, kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya antara kedua negara, terutama dalam hal perdagangan dan investasi, akan diperkuat melalui kunjungan ini. Diharapkan bahwa kerja sama ini akan membantu pemulihan ekonomi Indonesia dan Libya. Hubungan ini didorong oleh posisi strategis kedua negara: Libya memiliki banyak minyak dan gas di Timur Tengah, dan Indonesia memiliki banyak tambang, rempah-rempah, dan sumber daya laut di Asia Tenggara.

Namun, ketika konflik internal Libya pada tahun 2011 terjadi karena perebutan kekuasaan, hubungan Indonesia-Libya menjadi lebih buruk. Konflik yang dikenal sebagai Arab Spring dimulai dengan gerakan demokrasi di Benghazi yang menuntut perubahan pemerintahan dan reformasi konstitusional. Kelompok oposisi National Transitional Council (NTC) mengatakan bahwa pemerintahan Khadafi terlalu otoriter, dan beberapa negara Barat mendukung mereka untuk menggulingkannya.

PENUTUP

Pemberontakan Libya pada 2011 berdampak luas, termasuk pada negara-negara tetangga seperti Mali. Ketidakstabilan di Libya menyebabkan aliran senjata ke Mali utara, memperburuk konflik etnis yang telah berlangsung sejak 1960-an. Pada 2012, Al-Qaeda di Maghreb Islam (AQIM) dan sekutunya menguasai wilayah utara Mali, mengundang intervensi militer Prancis. Namun, kelemahan pemerintahan Libya memungkinkan AQIM dan kelompok terkait seperti Al-Mourabitoun untuk memperluas operasi mereka di Libya, di mana mereka mendapat akses lebih mudah ke senjata. Setelah kejatuhan Khadafi, ISIS juga mendirikan kamp pelatihan di Libya, yang berperan dalam beberapa serangan di Eropa. Khadafi sendiri menerapkan kebijakan luar negeri revolusioner yang agresif, dengan anggaran besar untuk militer, dukungan pada Pan Arabisme dan Unifikasi Afrika, serta bantuan militer kepada negara-negara lain untuk memperkuat pengaruhnya. Namun, banyak keputusan Khadafi yang tidak berkelanjutan dan berdampak pada sanksi internasional terhadap Libya. Dalam konteks internasional, hubungan bilateral Libya-Indonesia yang terjalin sejak 1991 melalui OKI dan

GNB mengalami penguatan dengan kunjungan Megawati ke Libya pada 2003 dan kunjungan balasan Khadafi ke Indonesia pada 2004. Sayangnya, konflik internal yang pecah pada 2011 merusak hubungan kedua negara, mengakhiri kedekatan yang telah terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, A., Humaidi. (2019). Muammar Khadafi: Kepemimpinannya Dari Awal Kudeta Tak Berdarah Hingga Revolusi Berdarah Di Libya (1969-2011). *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 1(1), 42-52
- Ani N., Lida P., (2015). Idris, Raja Libya yang Terlupakan. URL <https://internasional.republika.co.id/berita/nyavzd366/idris-raja-libya-yang-terlupakan-part3>.
- BerdikariOnline. (2020). Libya, Sebelum dan Setelah Khadafi. URL <https://www.berdikarionline.com/libya-sebelum-dan-pasca-khadafi/>.
- Britannica. (2024). Muammar Qaddafi. https://www-britannica-com.translate.google/biography/Muammar-al-Qaddafi?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- Hardi, A., SD., Rachma, P. (2021). DAMPAK KEGAGALAN REZIM KHADAFI TERHADAP MENINGKATNYA ESKALASI KONFLIK DAN INTERVENSI GLOBAL. Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura,
- Agni, V., P. (2018). Biografi Tokoh Dunia: Muammar Khadafi, Diktator Libya yang Digulingkan. URL <https://internasional.kompas.com/read/2018/06/08/19195971/biografi-tokoh-dunia-muammar-Khadafi-diktator-libya-yang-digulingkan?page=all>.
- Punky, M. (2013). MUAMMAR KHADAFI: KAJIAN TENTANG KEPEMIMPINANNYA DI LIBYA (1969-2011). Universitas Negeri Yogyakarta, Depok.
- Jerry, I. (2018). Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi. *Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 5(1)
- Muh. Ilham, S., M. Kholil, B., Amrosi. (2023). REVOLUSI LIBYA TAHUN 2011 DAN DAMPAKPEMAKZULAN MUAMMAR KHADAFITERHADAP LIBYA DAN NEGARA ARAB LAIN. *Journal of Islamic Studies*, 10(2) 5-10
- Amien, N., I. (2023). Profil Muammar Khadafi, Pemimpin Libya Terlama yang Berakhir Digulingkan dan Dibunuh. URL https://international.sindonews.com/read/1181385/177/profil-muammar-Khadafi-pemimpin-libya-terlama-yang-berakhir-digulingkan-dan-dibunuh-1692608917#goog_rewarded/.
- Harisuda, M. Yon, M. (2021). Peran dan Kepentingan North Atlantic Treaty Organization (NATO) Dalam Konflik Perang Sipil di Libya: Studi Kasus Periode Tahun 2011-2015. *Journal of Middle East and Islamic Studies*, 8(2) 17-19.
- Tito, H., R. (2021). Muammar Khadafi: Diktator Libya dan Kejatuhannya. URL. https://www.kompas.com/global/read/2021/09/18/141115270/muammar-Khadafi-diktator-libya-dan-kejatuhannya?page=all#google_vignette.

- Tandai, C. (2019). Bagaimana Perang Barat di Libya Memicu Terorisme di 14 Negara. URL <https://consortiumnews.com/id/2019/05/21/bagaimana-perang-barat-di-libya-memicu-terorisme-di-14-negara/>.
- Ananda, S., S. (2022). Hubungan Bilateral Indonesia dan Libya Semenjak Konflik Bersaudara Libya. URL <https://www.kompasiana.com/anandashafasyowati/633bc2a6a5a2394737655c43/hubungan-bilateral-indonesia-dan-libya-semenjak-konflik-bersaudara-libya>.
- Alwi, S. (2016). Memoar Muammar Khadafi dan Solidaritas Indonesia untuk Muslim Libya. URL <https://republika.co.id/berita/o7n371282/memoar-muammar-khadafi-dan-solidaritas-indonesia-untuk-muslim-libya>.
<https://www.liputan6.com/news/read/70786/muammar-khadafi-akan-ke-indonesia>.
- Ahmad, B., S. (2017). STUDI TENTANG MASA TRANSISI LIBYA PASCA ERA KHADAFI (2011-2014).
- MFakhriansyah. (2023). Presiden Terkaya Ini 'Dibunuh' AS Gegara Berani Buang Dolar. URL <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230602100503-4-442521/presiden-terkaya-ini-dibunuh-as-gegara-berani-buang-dolar>.
- Gama, P., Serafica, G. (2020). Konflik Libya: Runtuhnya Rezim Muammar Khadafi. URL <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/04/145845869/konflik-libya-runtuhnya-rezim-muammar-khadafi>.
- Martin, S. (2020). Kisah Jenderal Soemitro vs Kolonel Muammar Khadafi. URL <https://historia.id/histeria/articles/kisah-jenderal-soemitro-vs-kolonel-muammar-khadafi-6m7r9>.